

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM MENSUKSESKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH HULU SUNGAI UTARA PERIODE 2012-2017

Wahyu, Harpani Matnuh, Siti Nurfajrina Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT

Siti Nurfajrina, 2013. The Achievement of General Election Commission (KPUD) in Succeeding Hulu Sungai Utara (HSU) Regent Election Years 2012-2017. Sarjana's Thesis of Citizenship Department. Social Knowledge of FKIP Lambung Mangkurat University. Advisor (I) Wahyu, (II) Harpani Matnuh.

General election had strategical role in the process of developing democratic nation where societies were involved in the process of voting of political decisions by using their political rights and obligations as responsible citizen. Interrelated to the importance of general election in the process of democracy in a country, so it was important to manifest the really-based-democratic-values general election and support the democracy itself. So that there would be optimum achievement of the general commissions committee to manifest honest, free and fair. But in Regent General Election (Pemilukada) 2012 Kabupaten Hulu Sungai Utara that was held by KPUD HSU exposing accusation and disappointment of General Election participants to KPUD HSU. The purpose of this study was to analyze the achievement KPUD HSU monitored by 5 aspects, that is, productivity, responsiveness, responsibility and accountability.

The method of this research is qualitative approach, and to determine data source, this study used purposive sampling. Collecting data technique was conducted by observing, semi-structural interviewing, and documentation. Data analysis was conducted by reducing, providing and concluding the data.

The research result showed (1) The Productivity of KPUD Kabupaten HSU can be stated to be fair optimum. (2) The quality of service KPUD HSU in serving the participants in Regent General Election (Pemilukada) 2012 was categorized as the good one. (3) Responsiveness KPUD HSU in conducting Pemilukada 2012 was stated optimum. (4) Responsibility of KPUD HSU is less optimum in verification stage. (5) The accountability of KPUD HSU in conducting Pemilukada 2012 was optimum as well.

Based on the research result, it was suggested that (1) KPUD HSU should increase the understanding about Regent General Election to the society. (2) The KPUD HSU should increase the quality of service to the society and provide more complaint medium. (3) The KPUD HSU is expected to overcome the problem well. (4) The KPUD HSU should prepare in advance to conduct the trainings in order to understand the stage of regent general election process. (5) The KPUD HSU should give more attention to the officials or members of KPUD like motivation, work ethic, and the model in developing the quality of their workers.

Keywords: KPUD HSU, Achievement, Regent Election

A. PENDAHULUAN

Undang-undang No.15 Tahun 2011 Tentang Pemilu menegaskan bahwa; penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan rakyat dalam

pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan

pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara.

Pemilhan umum mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dalam sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu, keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya.

Menurut Ginsberg (1999:60-61) fungsi legitimasi ini merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional. Terkait pentingnya pemilu dalam proses demokratis di suatu negara, maka penting untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung demokrasi itu sendiri.

Pengamat otonomi daerah Siti Zuhro dari lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, juga salah satu anggota Tim Perumus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini menyatakan, "KPU dan Bawaslu sama-sama cenderung partisan. Dalam banyak kasus pilkada, mereka terlihat berpihak kepada salah satu kandidat atau parpol". Beliau juga menjelaskan, sebagai penyelenggara, KPU kerap terlihat kurang persiapan. Sebagai penanggung jawab, seharusnya KPU dapat mengantisipasi adanya kemungkinan terjadi kerusuhan dalam pilkada, dan mempersiapkan anggota-anggota KPU di daerah untuk menghadapi hal tersebut.

Mahkamah Konstitusi menerima banyak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum

daerah selama 2012. Banyaknya permohonan itu disebabkan kurangnya kepercayaan dari peserta pilkada terhadap Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara, peserta pilkada kurang percaya terhadap kinerja penyelenggara. Sebab jika kandidat merasa penyelenggara pemilu sudah baik, maka tentu saja mereka bisa dengan lapang dada menerima hasil yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU masing-masing daerah" demikian keterangan yang termuat dalam Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2012, Rabu (2/1).

Berdasarkan hasil kajian sementara, pelaksanaan pilkada di Hulu Sungai Utara tahun 2012 tercatat pilkada berlangsung di 586 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tersebar di 10 Kecamatan membawahi 219 Desa/Kelurahan dengan jumlah warga yang memiliki hak pilih aktif sebanyak 163.655 dengan terdapat beberapa kendala seperti;

1. Adanya keterlambatan dalam distribusi logistik yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada.
2. Terjadinya penolakan oleh peserta pilkada terhadap hasil pemungutan suara.
3. Adanya masalah terkait hasil verifikasi penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah HSU.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, kiranya dipandang perlu untuk dilakukan kajian terhadap kinerja KPU Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan pilkada di HSU.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Kinerja

Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas organisasi, baik itu dalam lembaga pemerintahan maupun swasta. Kinerja berasal dari bahasa job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang atau suatu institusi).

Menurut Prawirosentono (2000:1) mengatakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewangnya dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Kinerja terbaik menurut Griffin (Sule dan Saefullah, 2005:235) ditentukan oleh 3 faktor, yaitu :

- a. Motivasi, yaitu yang terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan.
- b. Kemampuan, yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk melakukan pekerjaan.
- c. Lingkungan pekerjaan, yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut.

3. Ukuran Keberhasilan Kinerja Suatu Organisasi

a. Produktivitas

Menurut Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas KPU itu mengenai bagaimana kualitas pegawai anggota KPU apakah sudah cukup berkualitas dan apa saja yang telah dilakukan anggota KPU dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah yang bebas, aman, jujur, dan adil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kualitas Layanan

Menurut Levine (dalam Nasucha, 2004:25), kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, yaitu masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas layanan yang dimaksud disini adalah bagaimana KPU dalam memberikan pelayanan yang efisien dan tepat guna kepada masyarakat, kualitas pelayanan tersebut dapat berupa informasi

yang diberikan, kepuasan sarana dan prasarana yang disediakan, keramahan dan kemampuan para pegawai dalam melayani masyarakat dan juga menerima keluhan dari masyarakat/calon pemilih.

c. Responsivitas

Menurut Agus Dwiyanto (2006 : 50) responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas KPU disini adalah mengenai bagaimana KPU memberikan tanggapan atau respon yang cepat terhadap keluhan masyarakat, tindakan untuk menindak lanjuti keluhan yang disampaikan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan, juga cepat tanggap jika KPU mendapatkan kritik saran atau masukan baik itu dari masyarakat atau calon peserta pemilu.

d. Responsibilitas

Menurut Dwiyanto(2006: 50) responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Responsibilitas KPU disini adalah mengenai prinsip administrasi KPU yang harus sesuai dengan tata cara penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menurut undang undang yang berlaku.

e. Akuntabilitas

Starling (Kumorotomu, 1998:164) mengatakan bahwa akuntabilitas ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik. Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Akuntabilitas KPU disini menjelaskan bahwa bagaimana KPU bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pemilihan kepala

daerah seperti adanya surat suara yang rusak, juga pelaporan hasil pemilu dan tanggungjawab lainnya menyangkut penyelenggaraan Pemilukada.

4. Pemilu kepala daerah

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat" (Tricahyo, 2009:6).

5. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

C. METODE PENELITIAN

1. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Wahyu (2007:55) mengapa metode kualitatif dipilih, dikarenakan permasalahan yang belum begitu jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dapat diungkap dalam metode penelitian kuantitatif. Selain itu, peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, 582 dan teori.

2. Tempat Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan komisi

pemilihan yang terletak di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat di JL. Khuripan no. 22 Amuntai, Kode pos 71414.

3. Sumber Data

Data primer data yang diperoleh secara langsung dari responden. Dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dan kuesioner dengan responden terpilih yang terpusat pada hal-hal yang berkaitan langsung khususnya mengenai produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas KPU dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah HSU.

Data sekunder yaitu data lain yang bersifat umum seperti data – data atau dokumen – dokumen administrasi yang meliputi peraturan perundang – undangan serta referensi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian juga dilakukan melalui studi kepustakaan dan buku-buku relevan untuk mendapatkan hasil analisis secara kualitatif.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti melakukan observasi secara mendalam sesuai dengan rumusan masalah guna mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Hasil observasi kemudian digali kembali dengan wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan peneliti sebelum turun ke lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi
- Wawancara
- Dokumentasi

6. Teknik Analisis Data

Pendapat Miles dan Huberman (Wahyu, 2006:60) aktivitas dalam analisis data :

- Data Reduction (Reduksi data)
- Data Display (Penyajian data)
- Conclusion Drawing/Verification

7. Pengujian Keabsahan Data

Agar diperoleh data yang absah, maka perlu dilakukan pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan cara:

- a. Perpanjangan Pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara dengan informan yang pernah ditemui maupun yang baru dan melakukan dokumentasi guna memperoleh data yang pasti kebenarannya mengenai produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas KPUD dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah HSU.
- b. Meningkatkan Ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.
- c. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
Triangulasi Sumber
 - 1) Triangulasi Sumber
 - 2) Triangulasi Teknik
 - 3) Triangulasi Waktu

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Produktifitas KPUD dalam mensukseskan pemilihan umum kepala daerah HSU

Menurut Herjanto (2001) produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam hal ini, pihak KPUD HSU dapat memberikan kesuksesan atau hasil yang baik dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di kabupaten HSU.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan dari pihak KPUD HSU, Komisi Pemilihan Umum Daerah Hulu Sungai Utara dapat memberikan kontribusi yang baik dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2012. Bisa dilihat dari tidak adanya kendala dalam distribusi logistik, KPUD HSU selalu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau daerah-daerah terpencil dengan jalan alternatif. Seperti yang

diungkapkan Hj. Syarifuddin selaku Kasubag Tekhnis Pemilu menjelaskan:

“Distribusi logistik kedaerah-daerah terpencil itu lancar-lancar saja, jadi melalui PTK dan kemudian PTK menyalurkan kepada BPS kemudian BPS kepada KPPS, jadi lancar saja tidak ada kendala walaupun tidak bisa lewat darat kami memakai speed boat lewat sungai, contohnya ke daerah paminggir kami naik motor dulu kemudian kami memakai speed boat langsung mengantar kepaminggirnya sampai disana PTK paminggir yang membagi ke TPS-TPS di desa-desa jadi tidak ada kendala.

2. Kualitas Layanan KPUD dalam mensukseskan pemilihan umum kepala daerah HSU

Kualitas Layanan menurut Levine (dalam Nasucha, 2004:25), kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, yaitu masyarakat puas atau tidak puas.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa pada aspek kualitas layanan KPUD HSU dapat dikatakan optimal. KPUD HSU terus meningkatkan layanan informasi penyelenggaraan tahapan Pemilu untuk kedepannya kepada masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari pemberian informasi pihak KPUD HSU melakukan kerjasama dengan KPUD Provinsi dalam memberikan surat edaran, menyediakan formulir pendaftaran, bersikap sopan dalam melayani komplain, KPUD HSU membuka diri, transparan dan bisa dipertanggung jawabkan, tidak menutup diri terhadap informasi yang masuk maupun yang perlu untuk disampaikan.

3. Responsivitas KPUD dalam mensukseskan pemilihan umum kepala daerah HSU

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu KPUD HSU selalu mempersiapkan diri menerima kedatangan para peserta bakal calon, menyiapkan formulir pendaftaran bagi peserta calon pemilukada lengkap dengan persyaratan yang harus dipenuhi selain itu juga

KPUD menindaklanjuti setiap komplain melalui rapat musyawarah sesama fungsioner dan juga memberikan pelatihan – pelatihan dalam persiapan Pemilu kepada para pegawainya sebelum dimulainya penyelenggaraan pesta demokrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Agus Dwiyanto (2008:50-51) bahwa responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. **Responsibilitas KPUD dalam mensukseskan pemilihan umum kepala daerah HSU**

Dari hasil wawancara dengan informan bahwa Responsibilitas KPUD HSU dikatakan kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu meskipun kerjasama dengan stakeholders cukup bagus berjalan dengan lancar, tetapi pada tahap verifikasi adanya dualisme pencalonan satu partai mencalonkan dua pasangan calon dan KPUD HSU pada saat itu dianggap mengahakimi sendiri, KPUD membenarkan satu pasangan calon tanpa mempertimbangkan dengan Mahkamah Partai karena yang dapat mengambil keputusan adalah pihak internal partai. Hal lain juga adanya gugatan penggelembungan suara yang sampai ke Mahkamah Konstitusi yang pada putusan akhir KPUD HSU dianggap bersih atau tidak bersalah dan seperti apa yang penulis asumsikan pada awal pengamatan itu sebatas dugaan saja. Seperti yang diungkapkan Muhammad Noor selaku ketua KPUD yang lama periode 2009-2013 mengatakan:

“Kemarin ada sedikit masalah saja tentang pemaksaan kehendak, yang lain tidak ada, sampai kemarin ada gugatan di Mahkamah Konstitusi bukan permasalahan sengketa pemilu tetapi adalah kekecewaan dugaan prasangka terhadap penggelembungan suara, tetapi ternyata tidak ada bukti”

5. **Akuntabilitas KPUD dalam mensukseskan pemilihan umum kepala daerah HSU**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pada aspek Akuntabilitas KPUD HSU dikatakan optimal yaitu KPUD HSU dapat mempertanggung jawabkan tugas mereka selaku penyelenggara pesta demokrasi, KPUD HSU menjalankan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai aturan yang berlaku, KPUD bersikap independen, mandiri, dan profesional selain itu juga KPUD bertanggung jawab terhadap setiap laporan keberatan mengenai administratif, KPUD berpegang teguh terhadap putusan hukum karena berkekuatan hukum.

Hal ini sejalan dengan pendapat Menurut Starling (Kumrotomu, 1998:164) mengatakan bahwa akuntabilitas ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik. Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Untuk itu diperlukan sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah yang memadai sebagai syarat penting peningkatan kualitas layanan publik.

E. **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

- Produktifitas KPUD Kabupaten HSU dalam penyelenggaraan pemilu 2012 dapat dikatakan cukup baik.
- Kualitas Layanan KPUD HSU dalam melayani para peserta Pemilu 2012 dalam penelitian ini dikategorikan baik.
- Responsivitas KPUD HSU dalam penyelenggaraan Pemilu 2012 telah dikatakan optimal.
- Responsibilitas KPUD HSU dalam penyelenggaraan pemilu 2012 dikatakan kurang optimal.
- Akuntabilitas KPUD HSU dalam penyelenggaraan pemilu 2012 dapat dikatakan optimal.

2. SARAN

- a. Hendaknya KPUD HSU lebih meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu dengan melakukan pendidikan politik/sosialisasi politik kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan pendidikan politik melalui media massa atau elektronik.
- b. Hendaknya KPUD HSU terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan menyediakan sarana pengaduan yang lebih banyak lagi seperti pos pengaduan, membuat website khusus KPUD HSU yang bisa dengan mudah diakses oleh siapa saja.
- c. Diharapkan KPUD HSU selalu menindaklanjuti masalah dengan penyelesaian yang tepat seperti bermusyawarah atau mengadakan rapat seluruh anggota beserta karyawan, menerima kritik dan saran dari pihak manapun dan mengikuti tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dengan baik.
- d. KPUD HSU hendaknya lebih mempersiapkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan agar dapat memahami ketentuan/tahapan-tahapan dalam proses pemilihan kepala daerah, bersikap jujur dan tegas terhadap aturan yang berlaku dan selalu mengadakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Ketua KPUD HSU hendaknya memberi perhatian yang lebih kepada para pegawai dan anggota KPUD berupa motivasi, semangat kerja, serta keteladanan dalam meningkatkan kualitas kinerja para pegawainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto Agus, 2006. *Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, S.P. Melayu, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Khoirudin, 2004. *Profil Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2010. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Mohmasun. 2011. *Akuntabilitas Kinerja*. Artikel (online) (<http://mohmasun.blogspot.com/2011/04/akuntabilitas-kinerja.htm> Diakses pada tanggal 23 september 2013)
- Program Studi Pendidikan Sosiologi dan PPKN, 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banjarmasin: FKIP UNLAM
- Samsul Wahidin, 2008. *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 20005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tanpa Nama. 2012. *Pengertian Kinerja*. Artikel (online) (http://www.sarjanaku.com/2012/06/_pengertian-kinerja-definisi-teori. Diakses pada tanggal 22 september 2012)

- Thoha, Miftah, 2005. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Program Sarjana (S1) - UNLAM. 2011. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Tim Redaksi. 2009. Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen. Bandung: Nuansa Aulia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Jakarta: Cemerlang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Depdiknas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jakarta: Cemerlang.
- Vitriani, Nike. 2009. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Artikel (online)(<http://eprints.undip.ac.id/8783/> Diakses pada tanggal 22 September 2012)
- Wahyu, 2011. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Banjarmasin : FKIP UNLAM.
- Wibowo, 2010. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali pers.